

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN BETET KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI

Taufiq Al-Amin*

Abstract

So far an approach in overcoming poverty, both at the national, regional and local, generally is with a purely economic approach. The problem of poverty seems to be simply understood as a problem of lack of income, so that the prevention programs which are carried out especially by the government focus only on the provision of assistance in the field of capital, the provision of subsidies, aid equipment and the like. This paper uses the form of social capital theory to understand, map out and promote poverty reduction by optimally utilizing social capital in the community.

By utilizing social capital theory of Bourdieu, Coleman and Putnam, this research takes place in the Betet Village, Pesantren, Kediri City as the unit of analysis. The basic consideration of the location chosen is that Betet village is one of village areas in Kediri which implements poverty reduction programs since 2009 until now.

The result shows that the poverty reduction in Betet village is implemented through a series of stages called PNPM Mandiri Urban cycle; it is started with a reflection of poverty, self power-mapping, determination of a medium-term program of poverty reduction programs. The characteristics of social capital of Betet Village community has grown and developed far before the PNPM program is implemented. The characteristics of social capital includes trust, links that has formed, values and norms that are awakened, participation and pro-active action. The existence of social capital contributes positively to their poverty reduction programs that emphasize community participation in various activities.

Keywords: Poverty, social capital, empowerment, PNPM-MP

Abstrak

Selama ini pendekatan dalam mengatasi kemiskinan, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal, umumnya adalah dengan pendekatan ekonomi semata. Masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kekurangan pendapatan, sehingga program penanggulangan yang dilakukan, khususnya yang dilakukan pemerintah, berfokus pada pemberian bantuan di bidang permodalan, pemberian subsidi, bantuan peralatan dan sebagainya. Tulisan ini berupa menggunakan teori modal sosial untuk memahami, memetakan dan mendorong pengetasan kemiskinan dengan memanfaatkan modal sosial secara maksimal di masyarakat.

Dengan memanfaatkan teori modal sosial dari Bourdieu, Coleman dan Putnam, penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagai unit analisis. Adapun dasar pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, antara lain bahwa Kelurahan Betet merupakan salah satu wilayah kelurahan di Kota Kediri yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Hasilnya, penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Betet dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang disebut siklus PNPM Mandiri Perkotaan, mulai refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, penetapan rencana program jangka menengah program penanggulangan kemiskinan. Karakteristik modal sosial masyarakat Kelurahan Betet sudah tumbuh dan berkembang jauh sebelum program PNPM dilaksanakan. Karakteristik modal sosial ini meliputi kepercayaan (*trust*), jaringan yang telah terbentuk, nilai dan norma yang terbangun, partisipasi dan tindakan pro-aktif. Keberadaan modal sosial ini berkontribusi positif dengan adanya program penanggulangan kemiskinan yang menekankan keikutsertaan masyarakat dalam beragam aktivitasnya.

Kata Kunci: Kemiskinan, modal sosial, pemberdayaan, PNPM-MP

*Dosen STAIN Kediri

I. PENDAHULUAN

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain dengan merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Di luar itu, tidak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin (antara lain melalui pemberian bantuan dana), membangun infrastruktur, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan dan lain-lain.

Untuk sebagian, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan pemerintah memang cukup bermanfaat. Namun, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan. Di sisi lain, tidak bisa diingkari fakta, bahwa kendati jumlah orang miskin menurun, namun kesenjangan dalam banyak hal justru semakin lebar.

Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif tampaknya adalah berkaitan dengan kurang dibangunnya ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan dirinya. Acap terjadi, kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk menyejahterakan penduduk miskin justru terjebak menjadi program yang melahirkan ketergantungan baru, dan bahkan mematikan potensi swakarsa lokal.

Diakui atau tidak, selama ini pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal, umumnya adalah dengan pendekatan ekonomi semata. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan

kekurangan pendapatan. Sangat kelihatan pula di berbagai program yang dilaksanakan pemerintah, umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi dan semacamnya.

Para peneliti menengahkan suatu pendekatan tentang penanggulangan kemiskinan, yang juga disarankan oleh para penasehat Bank Dunia. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan modal sosial. Pendekatan ini telah ditunjukkan oleh banyak peneliti yang menyakini bahwa pengentasan kemiskinan berkaitan erat dengan peranan modal sosial. Modal sosial berkaitan dengan *social networking*, *norm of trust*, *mutual reciprocity* dan *mutual benefit*. Hasil penelitian Putnam (2000; 2002)¹ dan Slamet (2010)² menunjukkan bahwa modal sosial dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan. Menurut hasil penelitian Ali Wafa (2010), modal sosial dapat diciptakan melalui 11 pembangunan institusi-institusi sosial. Institusi sosial memungkinkan terbentuknya modal sosial yang pada gilirannya dapat mengentaskan kemiskinan.

Konsep modal sosial (*social capital*) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia, karena dalam model ini manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar masyarakat dapat berperan dalam model pembangunan manusia. Padahal, kedua kapasitas tersebut baru bisa berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat. Keberadaan modal sosial juga menjadi penting dalam penanggulangan kemiskinan karena pengentasan kemiskinan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi juga perluasan akses terhadap sumber daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan jejaring

¹Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*, Princeton: Princeton University Press, 1993.

²Ali Wafa, *Urgensi Keberadaan Social Capital dalam Kelompok-kelompok Sosial Masyarakat*, Jurnal Fisip Universitas Indonesia, No.12. tahun 2010, hlm. 48-49

kerja (*network*) dan saling percaya (*mutual trust*) di kalangan masyarakat.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Adapun dasar pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, antara lain bahwa Kelurahan Betet merupakan salah satu wilayah kelurahan di Kota Kediri yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2009 sampai sekarang. Selain itu, Kelurahan Betet wilayahnya memiliki lahan pertanian cukup luas yakni 80,455 hektar ditambah luas ladangnya 47.030 hektar, namun dilihat dari tingkat produktifitas penduduknya justru rendah, yakni 59 Orang. Sedangkan dari sektor industri produktifitasnya paling tinggi yakni 593 Orang.⁴ Tulisan ini berfokus pada analisis tentang karakteristik modal sosial yang dimiliki masyarakat Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri, jaringan sosial dan kelembagaan yang dimiliki, serta kontribusi dan peranan modal sosial masyarakat melalui pengembangan kelembagaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

II. METODE PENELITIAN

1. Modal Sosial

Modal sosial (*Social Capital*) awalnya dipahami sebagai suatu bentuk di mana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian di dalamnya. Mereka membuat aturan kesepakatan bersama sebagai suatu nilai dalam komunitasnya. Di sini, aspirasi masyarakat mulai terakomodasi, komunitas dan jaringan lokal (kelembagaan) teradaptasi sebagai suatu modal pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat. Menurut World Bank (1998), modal sosial dalam lembaga sosial di masyarakat yang terdiri dari moral, kepercayaan, jaringan, dan tindakan sosial di dalamnya merupakan hal yang signifikan dalam pengembangan sosial dan ekonomi

masyarakat. Meskipun demikian, modal sosial tidaklah sederhana, yang hanya sebagai jumlah dari seluruh institusi yang ada, namun ia adalah juga semacam perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Dalam *social capital*, dibutuhkan adanya nilai saling berbagi (*shared values*) serta pengorganisasian peran-peran (*rules*) yang diekspresikan dalam hubungan-hubungan personal (*personal relationships*), kepercayaan (*trust*), dan *common sense* tentang tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat bukan hanya sekedar kumpulan individu belaka.⁵

Putnam (1995) mengartikan modal sosial sebagai; “features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit”. (Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama). Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social networks* dan *etworks of civic engagement*, jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).⁶

Menurut Woolcock (dalam Winter, 2000), konsep modal sosial pertama kali digunakan oleh L. F. Hanifan pada tahun 1916 ketika mempelajari bagaimana pengaruh sekolah desa (*rural school*) terhadap perkembangan daerah bagian Barat Virginia. Bourdieu (1986) mengemukakan, bahwa modal sosial merupakan sumberdaya dari suatu institusi kelompok. Modal sosial merupakan jaringan

³Ali Wafa, *Urgensi Keberadaan Social Capital dalam Kelompok-kelompok Sosial Masyarakat*, hlm. 45

⁴Data monografi Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren

⁵World Bank, *The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital Text of Proposal Approved for Funding*, Social Capital Initiative Working Paper No.2, tahun 1998. World Bank, *Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable Development Network*, June 1988.

⁶Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*, hlm. 23

kerja yang bersifat dinamis dan bukan alamiah serta merupakan investasi strategis baik secara individu maupun kelompok. Modal sosial dapat menghasilkan hubungan sosial secara langsung dan tidak langsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan ini dapat dilakukan dalam hubungan tetangga, teman kerja (tempat kerja), maupun hubungan antar famili.⁷

Jika dibandingkan dengan Bourdieu, Coleman menggunakan terminologi berbeda dalam menggambarkan modal sosial. Coleman menggambarkan modal sosial bukan saja dari hasil interaksi, tetapi lebih kepada fungsi dan nilai dari modal sosial itu sendiri. Ia memandang bahwa modal sosial memiliki nilai yang terkandung didalamnya terutama dalam struktur sosial. Lebih lanjut, Coleman juga menyebut modal sosial sebagai sumber-daya karena dapat memberi kontribusi terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat seperti halnya dengan sumberdaya atau modal lainnya (alam, ekonomi dan sumberdaya manusia).

Dari serangkaian definisi di atas, terlihat dengan jelas bahwa modal sosial memiliki penekanan dalam beberapa hal, yaitu jaringan, kepercayaan, norma dan tindakan sosial. Pierre Bourdieu memandang kekuasaan dalam konteks teori masyarakat, di mana ia melihat kekuasaan sebagai budaya dan simbol yang dibuat, dan terus-menerus kembali dilegitimasi melalui interaksi agen dan struktur. Cara ini terjadi melalui apa yang disebutnya 'habitus' atau norma yang disosialisasikan atau kecenderungan tentang perilaku, panduan dan mode berpikir.

Habitus adalah kebiasaan masyarakat yang melekat pada diri seseorang dalam bentuk disposisi abadi, atau kapasitas terlatih dan kecenderungan terstruktur untuk berpikir, merasa dan bertindak dengan cara determinan, yang kemudian membimbing mereka. Sedangkan menurut Ayub Sektiyanto bahwa *Habitus* merupakan hasil ketrampilan yang

menjadi tindakan praktis (tidak selalu disadari), yang diterjemahkan menjadi kemampuan yang terlihat alamiah. Jadi *Habitus* tumbuh dalam masyarakat secara alami melalui proses sosial yang sangat panjang, terinternalisasi dan terakulturasi dalam diri masyarakat menjadi kebiasaan yang terstruktur secara sendirinya. *Habitus* dibuat melalui proses sosial, bukan individu yang mengarah ke pola yang abadi dan ditransfer dari satu konteks ke konteks lainnya, tetapi yang juga bergeser dalam kaitannya dengan konteks tertentu dan dari waktu ke waktu. *Habitus* tidak tetap atau permanen, dan dapat berubah di bawah situasi yang tidak terduga atau selama periode sejarah panjang.

Bourdieu berargumen, mustahil memahami dunia sosial tanpa mengetahui peran 'modal dalam segala bentuknya, dan tidak sekadar dalam satu bentuk yang diakui oleh teori ekonomi'. Karya Bourdieu tentang modal sosial nyaris diabaikan oleh Coleman dan Putnam, maupun oleh ilmuwan sosial lainnya. Hal ini karena Bourdieu tidak melihat sisi gelap modal sosial. Kendati perhatiannya terhadap ketimpangan dan kekuasaan adalah koreksi yang sangat berguna bagi Putnam dan Coleman, penitikberatan satu sisi pada manfaat modal sosial bagi para pemiliknya diyakini sebagai satu kelemahan. Bourdieu melihat modal sosial yang terkesan sedikit kuno dan individualistis.

Demikianlah modal sosial dikonsepsikan oleh Bourdieu, Coleman, Putnam, namun ketiganya melakukannya dengan cara yang berbeda. Bourdieu meletakkan pendekatan ini pada satu arah, melihat modal sosial sebagai aset yang dimanfaatkan oleh kelompok elite, khususnya mereka yang memiliki modal finansial dan/atau modal budaya yang terbatas, seperti bangsawan Perancis dalam menjalani profesinya. Bagi Coleman, modal sosial pun dapat menjadi sumber daya bagi mereka yang relatif tidak diuntungkan, namun Coleman dan Bourdieu sama-sama menitikberatkan aset sebagai sesuatu yang menjadi milik individu atau keluarga. Putnam menggali konsep ini

⁷Ian Winter, *Towards a theorised understanding of family life and Social Capital*. Working Paper No. 21. ISSN 1440-4761. Australia: Australian Institute of Family Studies, 2000.

lebih dalam lagi, ketika melihatnya sebagai sumber daya yang berfungsi pada level sosial. Ciri ini menjadikan penjelasan Putnam rentan pada tuduhan fungsionalisme, dan dapat membantu menjelaskan penekanan yang terus dilakukannya pada sisi cemerlang modal sosial.

2. Kemiskinan

Di mata sebagian ahli, kemiskinan acapkali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat seperti ini, untuk sebagian mungkin benar, tetapi diakui atau tidak kurang mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

Banyak bukti menunjukkan bahwa yang disebut orang atau keluarga miskin pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Studi yang dilakukan Wignjosoebroto dkk., (1992) tentang kehidupan masyarakat rentan di Kotamadya Surabaya menemukan bahwa seseorang atau sebuah keluarga yang dalam kemiskinan, mereka umumnya tidaklah banyak berdaya, ruang geraknya serba terbatas, dan cenderung kesulitan untuk terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya. Jangankan untuk mengembangkan diri menuju ke taraf sejahtera, sedangkan untuk bertahan menegakkan hidup fisiknya pada taraf yang sub-sisten saja bagi keluarga miskin hampir-hampir merupakan hal yang mustahil, bila tidak ditopang oleh jaringan dan pranata sosial di lingkungan sekitarnya.

Definisi yang lebih lengkap tentang kemiskinan dikemukakan oleh John Friedman. Menurut Friedman (1979), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi. *Pertama*, modal produktif atas asset, misalnya tanah, perumahan, peralatan, dan kesehatan. *Kedua*, sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai. *Ketiga*, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. *Keempat*, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. *Kelima*, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Menurut akar penyebab yang melatarbelakanginya, secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya, faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan *patron-client*, jiwa gotong-royong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

Kedua, kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian, sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat

dari kemiskinan. Kemiskinan buatan, dalam banyak hal, terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus-menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras, kemiskinan buatan dalam perbincangan di kalangan ilmuwan sosial acapkali diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural. Menurut Selo Soemardjan (1980), yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Secara teoritis, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik.

Selama golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai berbagai kehidupan masyarakat, selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural.

Golongan yang menderita kemiskinan struktural itu, misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau para petani yang tanah miliknya kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan miskin lain adalah kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau apa yang dengan kata asing disebut *unskilled labour*. Golongan miskin ini meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah, yang sekarang dapat dinamakan golongan ekonomi sangat lemah.

Ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak terjadinya, walaupun terjadi sifatnya lamban sekali, apa yang disebut sebagai mobilitas sosial vertikal. Mereka yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya, sedangkan yang kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Mengapa bisa sampai begitu? Menurut pendekatan struktural, adalah terletak pada kungkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Umpamanya kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar bisa melepaskan diri dari kemelaratan.

Atas kelemahan konsep kemiskinan absolut tersebut, sangat dianjurkan bagi *stakeholders* di Kota Kediri untuk menggunakan konsep kemiskinan relatif sebagai pembanding. Data ini telah ada dan tersedia lengkap di 46 wilayah kelurahan di Kota Kediri, berdasarkan hasil sensus warga miskin melalui kegiatan pemetaan swadaya yang diprakarsai oleh Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), atau yang kini dikenal dengan PNPM

Mandiri Perkotaan. Penggunaan data warga miskin hasil pemetaan swadaya tersebut dapat direkomendasikan dengan pertimbangan bahwa; (i) Baik konsep kemiskinan absolut dan relatif keduanya menggunakan unit analisis yang sama, yaitu keluarga; (ii) Data tersedia lengkap *by name* dan *by address*; (iii) Tersedia data *update* yang secara berkala diperbarui setiap tahunnya melalui siklus *review* partisipatif; (iv) Dikelola oleh lembaga keswadayaan masyarakat yang representatif dan dapat dipertanggung-jawabkan validitasnya, dan yang paling mendasar (v) sesuai dengan kondisi nyata dan nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pembangunan, istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Carlzon dan Macauley sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (1998), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya. Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back (1995) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung-jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari "empowerment", pada intinya diartikan sebagai upaya untuk membantu *klien* memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.

Sementara menurut Shardlow dalam Adi (2008), pemberdayaan adalah bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi-dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain, adalah bagaimanamenolongmasyarakatuntukmampu menolong dirinya sendiri. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

III. PEMBAHASAN

A. Sebaran dan Jumlah Keluarga Miskin

Kemiskinan yang terjadi di masyarakat Betet kebanyakan berkaitan dengan kepemilikan aset, sedangkan tingkat kepedulian masyarakat cukup tinggi dan kerukunan di masyarakat masih terjaga. Sebaran keluarga miskin berada menyebar di seluruh wilayah kelurahan dan tidak membentuk kantong. Wilayah yang mempunyai keluarga miskin paling tinggi yaitu RW 3, sedangkan RW yang tidak terdapat

kemiskinan di daerahnya berada di RW 9, RT 22 dan RT 23, karena kawasan RT ini merupakan kawasan perumahan Kelurahan Betet.

Kondisi kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Betet, diketahui bahwa RT10 mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 10,52% dan RT11 mempunyai tingkat kemiskinan sebesar 7,58%. Tingkat kemiskinan yang terendah di Kelurahan Betet adalah RT 22 dan 23, serta RW 09 dengan prosentase 0,00%. Kedua RT ini merupakan kawasan Perumahan Betet Indah. Dari peta kondisi kemiskinan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat. Langkah pemetaan potensi tersebut disebut pemetaan swadaya. Dengan memanfaatkan potensi atau keswadayaan dapat ditemukan bagaimana strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut, mulai dari rembug masyarakat di tingkat RT hingga RW dan kelurahan. Keseluruhan tahapan tersebut difasilitasi oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), bersama fasilitator atau pendamping.

Dalam aktivitas penanggulangan kemiskinan, LKM Betet bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tujuan program tersebut yang menghendaki adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat sebesar-besarnya. Selain itu, bertitik tolak dari pemikiran bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi hasil tetapi juga memperhatikan proses. Dengan partisipasi dan keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas ini, tidak saja sebuah aktivitas dapat mudah dilakukan atau diselesaikan, namun juga menyangkut kepercayaan yang sangat penting. Kepercayaan (*trust*) adalah bagian penting dari modal sosial yang menjadikan sebuah program dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan pengguna, utamanya masyarakat miskin.

B. Karakteristik Modal Sosial

Salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pula pada kemampuan

sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota kelompok/masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Betet, peran serta masyarakat dalam program kemiskinan relatif tinggi. Keterlibatan tersebut dapat diciptakan karena adanya kebersamaan yang terus dibangun oleh masyarakat, maupun antara masyarakat dengan aparat kelurahan dalam berbagai kesempatan, misalnya lewat pertemuan rutin perbulan di kantor kelurahan maupun memanfaatkan pertemuan-pertemuan rutin keagamaan semacam pengajian, tahlil dan sejenisnya.

Keguyuban yang tercipta di masyarakat Betet relatif terjaga, mengingat Betet sebagai sebuah kelurahan dulunya adalah sebuah desa yang memiliki kesejarahan dan nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Partisipasi tersebut juga muncul saat kegiatan-kegiatan bersama digelar. Misalnya, saat penelitian ini bersamaan dengan pelaksanaan peringatan kemerdekaan RI, yakni mengadakan jalan santai mengelilingi Desa Betet. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, jumlah masyarakat yang terlibat sangat banyak. Kegiatan tersebut selain diikuti oleh anak-anak dan pemuda, juga diikuti oleh para orang tua, baik laki maupun perempuan. Hal ini membuktikan bahwa solidaritas sosial masyarakat Betet masih tinggi dan terkelola dengan baik.

1. Jaringan (*Reciprocity*)

Menurut Agusyanto (2007), jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus di mana

ada ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalamnya hubungan sosial. Dalam hal ini, hubungan sosial diikat oleh adanya unsur kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan oleh adanya norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan sosial, terdapat unsur kerja melalui hubungan sosial yakni kerja sama.

Karang Taruna Wijaya, Kelurahan Betet Kecamatan Santren Kota Kediri, telah didirikan sejak tahun 2008. Untuk lebih mengikat solidaritas antar anggota, mereka merencanakan kegiatan rutin yang positif. Salah satunya mengadakan pameran produk lokal berupa parut dan sulak. Sebelum acara rapat kerja di Karang Taruna Wijaya, biasanya diadakan arisan sebagai sarana bertemu dan berkumpul. "Kalau bertemu hanya untuk rapat, lama-lama akan jenuh. Akhirnya disepakati dalam persiapan rapat kerja sekaligus dibentuk kelompok arisan untuk menambah semangat kita bertemu," kata Hartono, Ketua Karang Taruna Wijaya Kelurahan Betet.

Dalam rapat kerja yang dilakukan secara singkat pada bulan April, memunculkan keinginan untuk melakukan sebuah kegiatan rutin, baik mingguan, bulanan maupun tahunan. Hasil raker menetapkan kegiatan rutin mingguan berupa arisan, bulanan berupa lintas alam yang diberi nama Kartapela, singkatan dari Karangtaruna Pecinta Alam, dan untuk kegiatan tahunan masih seputar Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), seperti Agustusan, Mauludan dan lain-lain. Selain itu juga melakukan kegiatan rutin setiap hari secara berkelanjutan, misalnya rebana, band, kerajinan tangan, musik akustik tradisional, kerja bakti, olahraga, pelatihan komputer, teater dan jalan santai. Kegiatan harian ini bisa bersifat insidental. Mengapa semua ini dilakukan? Menurut Hartono, untuk menunjukkan eksistensi organisasi Karang Taruna dan menumbuhkan kreatifitas bagi anggota yang baru, di samping itu juga sebagai upaya mengorganisir sumber daya lokal untuk dikembangkan.

2. Kepercayaan (*Trust*)

Trust atau rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Robert D. Putnam, 1993, 1995, dan 2002). Dalam pandangan Fukuyama (1995, 2002), *trust* adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

Ukuran kepercayaan antar individu dan antar kelompok di kelurahan Betet masih tinggi. Hal ini bisa peneliti tunjukkan lewat program PNPM dari aspek ekonomi, yaitu melalui ekonomi bergulir. Dalam kegiatan ini, masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha dipersilahkan untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang anggotanya lima orang. Dalam KSM tersebut, dibuat mekanisme peminjaman dan pengembalian yang sudah diatur sebelumnya. Setelah sepuluh bulan, dan menginjak sepuluh bulan kedua, didapatkan fakta bahwa KSM dalam mengelola pinjaman modal tidak ada yang macet. Kalaupun ada kasus tidak bisa bayar cicilan hanya beberapa orang saja, itupun tidak sampai mengganggu keuangan bersama.

Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa ikatan kepercayaan yang dibangun masih cukup efektif dan bisa menjadi modal berlangsungnya kegiatan tersebut hingga sampai putaran yang baru. Karena perguliran dana berjalan lancar dan tidak ada yang macet, maka KSM yang bersangkutan dapat mengajukan pinjaman modal lagi yang jumlahnya lebih besar dari tahun sebelumnya.

3. Norma Sosial.

Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan

yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis, tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

Perwujudan pelaksanaan norma dalam praktek di Kelurahan Betet tidak selalu dalam bentuk *manifest* dan formal. Norma yang dianut oleh masyarakat Betet lebih banyak terinternalisasi dalam setiap pribadi atau individu. Hal tersebut bisa dimaklumi karena pada dasarnya setiap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dilakukan melalui proses sosialisasi dan internalisasi sejak dini melalui keluarga. Keberadaan dan fungsi keluarga yang ada di masyarakat masih berjalan kuat, meski di sisi lain banyak mengalami tantangan yang semakin tidak kecil, yaitu dengan hadirnya media sebagai saluran informasi yang mengusung norma-norma baru dalam ranah internal mereka.

Pernah suatu ketika di Betet digemparkan dengan berita menyebarnya video porno yang diklaim pelakunya dari Betet. Menanggapi hal tersebut masyarakat terlihat sangat reaktif dalam mensikapinya, salah satunya adalah dengan melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kebenaran informasi tersebut. Apakah benar pelakunya dari masyarakat Betet. Setelah diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian, ternyata pelakunya bukan berasal dari Betet. Berdasarkan contoh kasus di atas, bahwa masyarakat masih memegang teguh norma. Karso, salah seorang warga mengatakan; "Menurut saya, kita semua jadi malu kalau memang berita tentang menyebarnya video porno tersebut benar. Lebih baik dia keluar saja dari Betet. Kita nggak mau desa ini dikotori oleh ulah oknum semacam itu"⁸

⁸Hasil wawancara tanggal 20 September 2015

4. Nilai-Nilai

Nilai adalah suatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Yang masuk dalam kategori ini, termasuk nilai-nilai baik yang bersumber dari adat istiadat maupun dari agama atau kepercayaan. Mayoritas masyarakat Betet adalah memeluk agama Islam, meskipun juga ada yang memeluk agama Kristen dan Katolik. Nilai-nilai kebersamaan, kejujuran dan kerjasama sangat menonjol pada masyarakat Betet. Hal ini peneliti temukan saat mereka menggelar acara, selain dalam kepanitiaan melibatkan warga yang berbeda agama juga dalam acara tersebut tidak jarang mengundang kesenian tradisi dari agama lain, misalnya saat jalan sehat bersama. Panitia juga mengundang kesenian Barongsai yang merupakan produk kesenian agama Konghucu. Saat itu, kesenian Barongsai yang diundang berasal dari Klenteng Tridarma Kediri.

Sebagai gambaran tingginya tingkat kebersamaan dan toleransi masyarakat, berikut komentar aktivis pemuda, Hartono; "Kebersamaan di Betet sudah lama terbangun dan biasa mengundang lain agama untuk terlibat dalam acara bersama. Di samping juga sudah ada peguyuban atau komunitas antar agama yang di dalamnya berkumpul beragam latar belakang sosial dan ekonomi, serta agama."⁹

5. Tindakan Proaktif

Salah satu unsur penting dari modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi, tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Ide dasar dari premis ini, bahwa seseorang atau kelompok senantiasa kreatif dan aktif. Mereka melibatkan diri dan mencari kesempatan-kesempatan yang dapat memperkaya, tidak saja dan sisi material tapi juga kekayaan hubungan-hubungan sosial, dan menguntungkan kelompok, tanpa merugikan orang lain secara bersama-sama. Mereka cenderung tidak menyukai bantuan-

⁹Hasil wawancara tanggal 24 september 2015

bantuan yang sifatnya dilayani, melainkan lebih memberi pilihan untuk lebih banyak melayani secara proaktif. Bentuk modal sosial ini biasa juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip universalisme tentang persamaan, kebebasan, nilai-nilai kemajemukan dan kemanusiaan, terbuka dan mandiri.

Prinsip pertama yang dimiliki masyarakat Betet, yaitu persamaan bahwasanya setiap anggota dalam suatu kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap anggota kelompok. Kedua, adalah kebebasan bahwasannya setiap anggota kelompok bebas berbicara, mengemukakan pendapat dan ide yang dapat mengembangkan kelompok tersebut. Ketiga, adalah kemajemukan dan humanitarian. Bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, group, atau kelompok melalui masyarakat tertentu.

Di Kelurahan Betet, banyak kelompok sosial dibentuk dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Bentuk-bentuk kelompok yang sudah ada selalu melibatkan kalangan pemuda dan tokoh masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut sering mengadakan pertemuan dan sesekali mengadakan pertemuan bersama di tingkat kelurahan.

C. Kontribusi dan Peran Modal Sosial dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Kontribusi dan peran modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan senantiasa bervariasi tergantung kesungguhan pelaksana program dalam mengikutsertakan hal tersebut dalam setiap tahapan, Dalam program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan lewat PNPM Perkotaan, terdapat siklus atau tahapan yang harus dilalui. Siklus tersebut dapat menjadi ukuran atau indikator

seberapa besar modal sosial disertakan dalam setiap tahapannya. Berikut ini akan dijelaskan peran modal sosial dan kontribusinya dalam setiap siklus atau tahapan.

1. Refleksi Kemiskinan

Refleksi kemiskinan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. Kesadaran kritis ini menjadi penting, karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai 'objek', masyarakat diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya, masalah dirumuskan oleh 'orang luar'. Kondisi tersebut menyebabkan dalam pemecahan masalah, masyarakat hanya sekedar melaksanakan kehendak 'orang luar' atau karena tergiur dengan 'iming - iming' bantuan uang, bukan melaksanakan kegiatan karena benar-benar menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka.

Metode yang digunakan dalam refleksi kemiskinan adalah FGD (*focus group discussion*) atau DKT (diskusi kelompok terarah). *Focus Group Discussion* atau Diskusi kelompok Terarah merupakan metodologi penelitian (wawancara kelompok) untuk menggali persepsi, pendapat dan harapan-harapan dari sekelompok responden yang diwawancara. Apabila ingin mengetahui persepsi responden dari kelompok tertentu secara khusus, maka FGD biasanya dilakukan untuk kelompok khusus. Misalnya, untuk mengetahui persepsi perempuan terhadap air bersih, maka dilakukan hanya untuk kelompok perempuan dengan asumsi bahwa kelompok laki-laki akan mempunyai persepsi yang berbeda dengan perempuan terhadap air bersih.

Dalam pelaksanaan refleksi kemiskinan, ada 2 hal penting yang harus dilakukan, yaitu olah rasa dan olah pikir, sehingga pendalaman yang dilakukan melibatkan mental, rasa dan karsa. Yang pertama adalah olah pikir. Proses ini merupakan analisis kritis terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi

masyarakat, untuk membuka mekanisme-mekanisme yang selama ini sering tidak tergalikan dan tersembunyi di dalamnya. Analisa kritis terhadap permasalahan kemiskinan sering juga disebut sebagai analisa sosial, artinya mencari secara kritis hubungan sebab akibat, sampai hal-hal yang paling dalam sehingga dapat ditemukan akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya.

Kedua adalah olah rasa, yaitu upaya untuk merefleksikan ke dalam, terutama yang menyangkut sikap dan perilaku mereka terhadap permasalahan kemiskinan. Upaya olah rasa lebih menyentuh 'hati' masing-masing orang yang terlibat dalam proses refleksi untuk merenungkan apa yang telah diperbuat, sumbangan apa yang telah diberikan untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dan bagi kesejahteraan dan perbaikan hidup masyarakat

Dari olah pikir dan olah rasa di atas, diharapkan cara pandang peserta yang terlibat dalam diskusi akan berubah dan berimplikasi pada:

1. Kesadaran bahwa seharusnya mereka tidak menjadi bagian yang menambah persoalan, tetapi merupakan bagian dari pemecahan masalah dengan cara berkehendak untuk memelihara nilai-nilai luhur kemanusiaan,
2. Tumbuhnya pemahaman bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur, merupakan awal dari tumbuhnya modal sosial, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak luar terhadap masyarakat setempat.

Berbicara tentang sumber daya lokal, di Kelurahan Betet terdapat banyak sekali *home industry*, seperti kopi bubuk gatut kaca, meubel, perusahaan peleg (daur ulang), jok kendaraan, parut, sulak, keset, dan masih banyak lagi. Untuk pengrajin sulak, bahkan melibatkan warga sekitar untuk menjadi tenaga kerja borongan.

Hasil produksi sulak Betet dipasarkan ke Jakarta, Bali, Tulungagung, Blitar, dan Kediri sendiri. Untuk ekspornya dilakukan oleh tangan kedua, yakni distributor yang

mengambil langsung dari pengrajin di Betet dan diekspor ke Australia. Kendalanya untuk melakukan sendiri, sementara jaringan keluar itu belum dimiliki sehingga harus ada distributor sendiri yang melakukannya.

Sumber daya yang dimiliki kelurahan Betet, menginspirasi pemuda Karangtaruna untuk mengadakan pameran produk lokal sekaligus gebyar seni. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kreatifitas pengurus Kartar yang kedepannya akan membangun sendiri usaha bersama. Har, salah seorang responden penelitian mengaskan; "Penampilan musik rebana, musik akustik, musik tradisional kenthongan, teater, pameran lukisan, dan pameran produk lokal diharapkan akan menumbuhkan bakat-bakat baru bagi anggota Kartar".

Tanggapan Lurah Betet, Surono, terkait kegiatan yang dilakukan pemuda sangat positif. Di berujar; "Oke, kita akan usahakan sebagian pendanaan dari kelurahan karena untuk tahun ini belum ada alokasi dana terkait kepemudaan. Sebab LPMK, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, sebagai pengelola anggaran kelurahan belum mengalokasikan dana untuk kegiatan karangtaruna atau pemuda.

2. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Di masyarakat pada umumnya telah ada banyak kelompok masyarakat, baik yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sendiri, maupun oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepedulian. Ketika PNPM-MP juga menggunakan pendekatan kelompok, maka PNPM-MP akan banyak membentuk KSM, meskipun tidak menutup kemungkinan memaksimalkan kelompok-kelompok yang sudah ada. Ada kemungkinan kelompok PNPM-MP agak berbeda dengan kelompok lain yang sudah ada, karena KSM di PNPM-MP adalah KSM yang terdiri dari warga miskin dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga miskin.

Terbentuknya KSM-KSM yang dibentuk PNPM Mandiri Perkotaan akan terjadi di antara

kelompok-kelompok yang sudah eksis. Hal itu akan menambah dinamika di masyarakat karena antar kelompok akan bisa saling berinteraksi dan saling belajar. Bahkan, sangat memungkinkan kelompok yang telah lama eksis dan mempunyai banyak pengalaman bisa memberikan banyak masukan, bimbingan dan dorongan kepada kelompok baru. Sebaliknya, kelompok yang sudah eksis juga bisa belajar dari kelompok PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan demikian, masing-masing kelompok bisa menggalang persatuan dan kekuatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Agar KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan benar-benar menjadi wadah bagi pemberdayaan anggota, maka ada beberapa prinsip yang perlu disepakati yang bisa dijadikan pedoman di internal KSM, antara lain;

- 1) Saling mempercayai dan saling mendukung. Sikap tersebut bisa membuat anggota mampu mengekspresikan gagasan, perasaan dan kekhawatirannya dengan nyaman. Setiap anggota KSM bebas mengungkapkan pemikiran dan pendapat serta mengajukan usul dan saran yang perlu dijadikan pembahasan dalam rapat kelompok tanpa adanya rasa segan atau adanya hambatan psikologis lainnya.
- 2) Bebas dalam membuat keputusan. Kelompok bebas menentukan dan memutuskan menurut kesepakatan yang diambil oleh kelompok sendiri. Keputusan kelompok harus merupakan hasil dari permusyawaratan bersama dan tidak diperkenankan adanya dominasi dari perorangan atau beberapa orang yang bersifat pemaksaan kehendak atau intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kelompok juga berwenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan keputusan bersama
- 3) Bebas dalam menetapkan kebutuhan. Dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitasnya, KSM meningkatkan dan menguatkan tingkat kemampuan para anggotanya seperti: peningkatan

kesejahteraan, peningkatan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan baik bersifat individu maupun kelompok

- 4) Berpartisipasi nyata. Setiap anggota wajib berkontribusi kepada kelompok sebagai wujud komitmen dalam rangka keswadayaan serta ikatan kelompok.

Berangkat dari kondisi tersebut, ada dua alternatif yang bisa dilakukan program penanggulangan kemiskinan ini, yaitu: pertama, bekerja dengan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat atau; kedua, membangun dan mendampingi kelompok-kelompok baru. Setiap alternatif memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bekerja dengan kelompok yang sudah ada di masyarakat membuat program lebih efisien, penerimaan masyarakat terhadap program berlangsung relatif lebih cepat dan dukungan sumber daya lokal lebih mungkin digalang. Akan tetapi, kelompok yang sudah ada telah memiliki nilai-nilai dan aturan main yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh program ini.

Apapun pilihan pendekatan yang diambil, apakah bekerja dengan kelompok yang ada atau membentuk baru, arah pendampingan tetap ditujukan kepada penguatan kapasitas kelompok sehingga mereka bisa membangun kultur kelompok yang lebih terbuka, adil, bertanggungjawab dan mandiri. Kelompok-kelompok masyarakat yang berhimpun untuk mencoba memecahkan permasalahan anggota secara bersama untuk menanggulangi kemiskinan disebut dengan "Kelompok Swadaya Masyarakat" (KSM). Kelompok ini harus menjamin kegiatannya berorientasi untuk memecahkan permasalahan kemiskinan, artinya penerima manfaat primer dari kegiatan yang dilaksanakan adalah warga miskin yang sudah teridentifikasi dari hasil pemetaan swadaya. Pengembangan KSM dengan menggunakan kelompok yang sudah ada dan pembangunan KSM baru dimulai dengan Musyawarah.

Musyawarah pengembangan KSM ini merupakan kegiatan awal proses pembelajaran

di tingkat masyarakat bertumpu pada kelompok. Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penentuan kelompok masyarakat yang akan didampingi. Keputusan apakah satu kelompok bisa didampingi atau tidak harus merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota kelompok dan pelaku program penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan/desa. Semua pihak harus bersepakat akan “substansi pesan”, tujuan, nilai, prinsip-prinsip dasar, serta peran dan fungsi pengembangan KSM.

3. Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Bantuan Langsung Masyarakat melalui PNPM-MP yang telah di terima LKM Sejahtera Kelurahan Betet sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta rupiah) yang telah di salurkan mulai tahun 2009 sampai tahun 2014. Dana tersebut terinci sebagai berikut; tahun 2009 BLM yang diterima sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), tahun 2010 BLM yang diterima Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), tahun 2011 BLM yang diterima sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), tahun 2012 BLM yang diterima sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), tahun 2013 BLM yang diterima sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), tahun 2014 BLM yang diterima sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah)

Dana BLM LKM Sejahtera Kelurahan Betet dimanfaatkan ke dalam kegiatan Tridaya pembangunan sebagai berikut:

4. Kemitraan (*Channeling*)

Tahun 2011, LKM Sejahtera Kelurahan Betet melakukan kemitraan bersama Dinas Perikanan kota Kediri melalui kegiatan sosial yang teraplikasikan melalui pelatihan budidaya ikan lele. Sedangkan peran Dinas Perikanan dalam kemitraanya adalah melalui bantuan bibit ikan, pelatihan budidaya dan Pembinaan Rutin di setiap bulannya,

Tahun 2014, KSM Bintang Harapan dan Jaya Abadi sebagai binaan LKM Sejahtera melakukan kemitraan dengan Komisi PPAD melalui sosialisasi HIV AIDS sebagai dampak perilaku sosial. Peran Komisi PPAD memfasilitasi nara sumber, tempat dan konsumsi. Selain itu, di tahun yang sama kedua KSM tersebut juga melakukan kemitraan dengan Dinas Pertanian dan Peternakan dengan melaksanakan Pelatihan Budidaya Ikan Hias Cupang. Peran dinas dalam hal ini adalah memberikan pelatihan dan juga bibit ikan cupang.

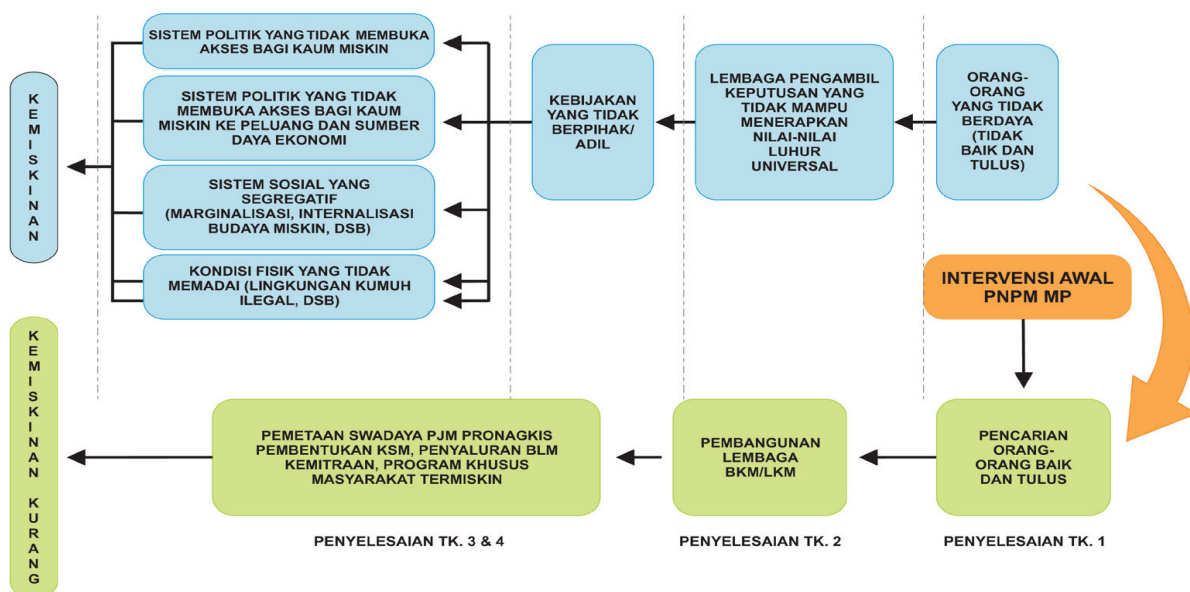
Lemahnya modal sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi modal sosial masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat. Akibatnya menimbulkan kecurigaan, ketidakpedulian dan skeptisme di masyarakat.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Pagu Tahun	Pemanfaatan Tridaya (Rp)			Pemanfaatan BOP (Rp)	Total (Rp)
	Lingkungan	Ekonomi	Sosial		
2009	120.750.000	55.000.000	16.750.000	7.500.000	200.000.000
2010	174.750.000		17.750.000	7.500.000	200.000.000
2011	152.800.000	20.000.000	19.700.000	7.500.000	200.000.000
2012	165.000.000	20.000.000	7.500.000	7.500.000	200.000.000
2013	180.000.000		12.500.000	7.500.000	200.000.000
2014	145.500.000		47.000.000	7.500.000	200.000.000

Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini banyak terjadi di mana lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada belum berdaya, karena dikelola oleh orang-orang yang tidak berdaya yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kebijakan-kebijakan yang diputuskannya. Lembaga kepemimpinan semacam ini pada umumnya memang tidak mengakar. Pengurusnya tidak dipilih secara benar dan banyak menjadi perpanjangan tangan pihak-pihak tertentu sehingga lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar, parsial atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, terutama masyarakat miskin. Kondisi ini justru akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada di wilayahnya. Kondisi kelembagaan pimpinan masyarakat yang tidak mengakar dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi di mana masyarakat secara umum memang belum berdaya.

Berikut dapat dilihat skema penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM perkotaan:



Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM-MP adalah

keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi Indeks Pembangunan Manusia, serta Tujuan Pembangunan Global (IPM-MDGs).

IV. KESIMPULAN

Program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang disebut siklus PNPM Mandiri Perkotaan, mulai refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, penetapan rencana program jangka menengah program penanggulangan kemiskinan yang disingkat PJM Pronangkis. Kegiatan siklus tersebut melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk keterlibatan keluarga miskin di dalamnya, yaitu mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap monitoring dan evaluasi.

Karakteristik modal sosial masyarakat Kelurahan Betet sudah tumbuh dan berkembang jauh sebelum program PNPM dilaksanakan. Karakteristik modal sosial ini meliputi kepercayaan (*trust*), jaringan yang telah

terbentuk, nilai dan norma yang terbangun, partisipasi dan tindakan pro-aktif. Keberadaan

modal sosial ini berkontribusi positif dengan adanya program penanggulangan kemiskinan yang menekankan keikutsertaan masyarakat dalam beragam aktivitasnya.

Sementara itu, jaringan sosial dan kelembagaan yang dimiliki masyarakat Kelurahan Betet juga sudah mulai terbangun lama di masyarakat. Jaringan sosial ini selalu diperlukan dalam setiap aspek kehidupan bersama, misalnya di bidang kesehatan, keagamaan, pendidikan dan keamanan lingkungan. Jaringan sosial dan kelembagaan di masyarakat Kelurahan Betet tumbuh seiring dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. Jaringan dan kelembagaan tersebut bersifat non-formal atau kultural. Sedangkan jaringan dan kelembagaan yang bersifat formal mengikuti pola dan sistem pemerintahan di mana suatu program membutuhkan pembentukan lembaga baru.

Keberadaan modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Betet sangat besar peranannya. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya siklus PNPM yang mengkonsepsikan pentingnya partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sesuai dengan nilai dan norma sosial yang dimiliki masyarakat. Salah satu peran modal sosial dalam program tersebut adalah tumbuhnya kepercayaan (*trust*) antar para pelaku program, pembagian tugas antar bidang dan tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan. Hal tersebut dapat diamati melalui beragam kegiatan yang tercakup dalam tridaya, yaitu bidang pembangunan infra struktur lingkungan, bidang sosial dan bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Saleh, *Penguatan Kelembagaan Lokal Melalui Pendekatan Modal Sosial di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat*, Penelitian Bappeda Kabupaten Mamuju Utara dengan Universitas Hasanuddin, 2009.
- Andini, Mita dan Dyah Budiastuti, *Analisis Pengaruh Kreativitas dan Perilaku Inovatif Terhadap Kinerja Karyawan*, Penelitian Binus University, Jakarta, 2011.
- Asar, Muhammad, *Dialektika Pengetahuan Lokal dan Non Lokal. Studi Kasus Pasang Ri Kajang dalam Pengelolaan Hutan Adat Ammatoa (Disertasi)*, 2013.
- Chambers, R. *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Ibrahim, L. D. *Memanfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal dalam Program Kepedulian Korporasi*. Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol.1.No. 2. Tahun 2006.
- Koentjaraningrat, *Penduduk Indonesia; Masalah-Masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Lawang R, M,Z, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Fisip UI Press, 2004.
- Pranadji, T., *Model Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan untuk Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering (Studi Penguatan Modal Sosial dalam Desa-desa Hulu DAS Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunung Kidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali, Disertasi IPB Bogor, tahun 2006.*
- Suandi, *Modal Sosial dan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Daerah Perdesaan Provinsi Jambi (Disertasi)*, tahun 2007,
- Wafa, Ali. *Urgensi Keberadaan Social Capital dalam Kelompok-kelompok Sosial*. Masyarakat, Jurnal Fisip Universitas Indonesia. No.12. tahun 2003.